



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO.2 JAKARTA PUSAT 10310
TELEPON (021) 31936207; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 370/BD.01.02/P.01/B/03/2022 30 Maret 2022
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penawaran Kerja Sama Program Pendidikan *Cost Sharing*

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan bagi ASN di bidang perencanaan pembangunan nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas (Pusbindiklatren) mengembangkan program kerja sama *cost sharing* (pembiayaan bersama) untuk program pendidikan S-2 maupun S-3. Program *cost sharing* ini dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan instansi lainnya sesuai dengan tujuan dan ketentuan program pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menawarkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat menjadi mitra kerja sama program pendidikan *cost sharing* Pusbindiklatren. Penjelasan lebih rinci mengenai program pendidikan *cost sharing* terdapat dalam kerangka acuan kerja terlampir. Apabila Bapak/Ibu bersedia, kami harapkan dapat mengisi formulir kesediaan terlampir atau dapat mengisi formulir dalam tautan <https://bit.ly/Formulir-Cost-Sharing>. Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi dan pembahasan kerja sama serta mekanisme pelaksanaan program pendidikan *cost sharing* segera setelah Bapak/Ibu menyampaikan surat kesediaan.

Kami mengharapkan dapat menerima formulir paling lambat pada 30 Juni 2022. Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi staf kami Diana Ayu Ahira di nomor ponsel/*whatsapp* 0823-2956-9988 atau melalui pos elektronik/*e-mail* pusbindiklatren@bappenas.go.id. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas.



Lampiran Surat
Nomor : 370/BD.01.02/P.01/B/3/2022
Tanggal : 30 Maret 2022

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian
Kementerian/Lembaga

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
16. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
17. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
18. Badan Pusat Statistik (BPS)
19. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
20. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
21. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
22. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
23. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
25. Kejaksaan Agung
26. Kementerian Agama
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Dalam Negeri
30. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
31. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
33. Kementerian Kelautan dan Perikanan
34. Kementerian Kesehatan
35. Kementerian Ketenagakerjaan
36. Kementerian Komunikasi dan Informatika
37. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
38. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
39. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
40. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
41. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
42. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43. Kementerian Luar Negeri

44. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
45. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
46. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
47. Kementerian Pemuda dan Olahraga
48. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
49. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
50. Kementerian Perdagangan
51. Kementerian Perhubungan
52. Kementerian Perindustrian
53. Kementerian Pertahanan
54. Kementerian Pertanian
55. Kementerian Sekretariat Negara
56. Kementerian Sosial
57. Sekretariat Kabinet
58. Komisi Yudisial
59. Mahkamah Konstitusi
60. Ombudsman Republik Indonesia
61. Perpustakaan Nasional
62. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
63. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
64. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
65. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

PEMERINTAH PROVINSI

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Sumatera

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Selatan
4. Sumatera Barat
5. Bengkulu
6. Riau
7. Kepulauan Riau
8. Jambi
9. Lampung
10. Bangka Belitung

Kalimantan

1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Tengah
5. Kalimantan Utara

Jawa

1. Banten
2. DKI Jakarta
3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. DI Yogyakarta

6. Jawa Timur

Nusa Tenggara dan Bali

1. Bali
2. Nusa Tenggara Barat
3. Nusa Tenggara Timur

Sulawesi

1. Gorontalo
2. Sulawesi Barat
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Utara
5. Sulawesi Tenggara
6. Sulawesi Selatan

Maluku dan Papua

1. Maluku Utara
2. Maluku
3. Papua Barat
4. Papua

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang/da) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam



2. Provinsi Sumatera Utara
 - 2.1. Kabupaten Asahan
 - 2.2. Kabupaten Batubara
 - 2.3. Kabupaten Dairi
 - 2.4. Kabupaten Deli Serdang
 - 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 2.6. Kabupaten Karo
 - 2.7. Kabupaten Labuhan Batu
 - 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
 - 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
 - 2.10. Kabupaten Langkat
 - 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
 - 2.12. Kabupaten Nias
 - 2.13. Kabupaten Nias Barat
 - 2.14. Kabupaten Nias Selatan
 - 2.15. Kabupaten Nias Utara
 - 2.16. Kabupaten Padang Lawas
 - 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
 - 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
 - 2.19. Kabupaten Samosir
 - 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
 - 2.21. Kabupaten Simalungun
 - 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
 - 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
 - 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
 - 2.25. Kabupaten Toba Samosir
 - 2.26. Kota Binjai
 - 2.27. Kota Gunung Sitoli
 - 2.28. Kota Medan
 - 2.29. Kota Padangsidimpuan
 - 2.30. Kota Pematang Siantar
 - 2.31. Kota Sibolga
 - 2.32. Kota Tanjung Balai
 - 2.33. Kota Tebing Tinggi
3. Provinsi Sumatera Barat
 - 3.1. Kabupaten Agam
 - 3.2. Kabupaten Dharmasraya
 - 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
 - 3.6. Kabupaten Pasaman
 - 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
 - 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
 - 3.9. Kabupaten Sijunjung
 - 3.10. Kabupaten Solok
 - 3.11. Kabupaten Solok Selatan

- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok
- 4. Provinsi Riau
 - 4.1. Kabupaten Bengkalis
 - 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
 - 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
 - 4.4. Kabupaten Kampar
 - 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
 - 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
 - 4.7. Kabupaten Pelalawan
 - 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
 - 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
 - 4.10. Kabupaten Siak
 - 4.11. Kota Dumai
 - 4.12. Kota Pekanbaru
- 5. Provinsi Kepulauan Riau
 - 5.1. Kabupaten Bintan
 - 5.2. Kabupaten Karimun
 - 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
 - 5.4. Kabupaten Lingga
 - 5.5. Kabupaten Natuna
 - 5.6. Kota Batam
 - 5.7. Kota Tanjung Pinang
- 6. Provinsi Jambi
 - 6.1. Kabupaten Batanghari
 - 6.2. Kabupaten Bungo
 - 6.3. Kabupaten Kerinci
 - 6.4. Kabupaten Merangin
 - 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
 - 6.6. Kabupaten Sarolangun
 - 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - 6.9. Kabupaten Tebo
 - 6.10. Kota Jambi
 - 6.11. Kota Sungai Penuh
- 7. Provinsi Bengkulu
 - 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
 - 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah

- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
 - 7.4. Kabupaten Kaur
 - 7.5. Kabupaten Kepahiang
 - 7.6. Kabupaten Lebong
 - 7.7. Kabupaten Mukomuko
 - 7.8. Kabupaten Rejang Lebong
 - 7.9. Kabupaten Seluma
 - 7.10. Kota Bengkulu
8. Provinsi Sumatera Selatan
- 8.1. Kabupaten Banyuasin
 - 8.2. Kabupaten Empat Lawang
 - 8.3. Kabupaten Lahat
 - 8.4. Kabupaten Muara Enim
 - 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
 - 8.6. Kabupaten Musi Rawas
 - 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
 - 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
 - 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 - 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 8.14. Kota Lubuk Linggau
 - 8.15. Kota Pagar Alam
 - 8.16. Kota Palembang
 - 8.17. Kota Prabumulih
9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 9.1. Kabupaten Bangka
 - 9.2. Kabupaten Bangka Barat
 - 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
 - 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
 - 9.5. Kabupaten Belitung
 - 9.6. Kabupaten Belitung Timur
 - 9.7. Kota Pangkal Pinang
10. Provinsi Lampung
- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
 - 10.2. Kabupaten Lampung Utara
 - 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
 - 10.4. Kabupaten Lampung Barat
 - 10.5. Kabupaten Lampung Timur
 - 10.6. Kabupaten Mesuji
 - 10.7. Kabupaten Pesawaran
 - 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
 - 10.9. Kabupaten Pringsewu
 - 10.10. Kabupaten Tulang Bawang

- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro
- 11. Provinsi Banten
 - 11.1. Kabupaten Lebak
 - 11.2. Kabupaten Pandeglang
 - 11.3. Kabupaten Serang
 - 11.4. Kabupaten Tangerang
 - 11.5. Kota Cilegon
 - 11.6. Kota Serang
 - 11.7. Kota Tangerang
 - 11.8. Kota Tangerang Selatan
- 12. Provinsi Jawa Barat
 - 12.1. Kabupaten Bandung
 - 12.2. Kabupaten Bandung Barat
 - 12.3. Kabupaten Bekasi
 - 12.4. Kabupaten Bogor
 - 12.5. Kabupaten Ciamis
 - 12.6. Kabupaten Cianjur
 - 12.7. Kabupaten Cirebon
 - 12.8. Kabupaten Garut
 - 12.9. Kabupaten Indramayu
 - 12.10. Kabupaten Karawang
 - 12.11. Kabupaten Kuningan
 - 12.12. Kabupaten Majalengka
 - 12.13. Kabupaten Pangandaran
 - 12.14. Kabupaten Purwakarta
 - 12.15. Kabupaten Subang
 - 12.16. Kabupaten Sukabumi
 - 12.17. Kabupaten Sumedang
 - 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
 - 12.19. Kota Bandung
 - 12.20. Kota Banjar
 - 12.21. Kota Bekasi
 - 12.22. Kota Bogor
 - 12.23. Kota Cimahi
 - 12.24. Kota Cirebon
 - 12.25. Kota Depok
 - 12.26. Kota Sukabumi
 - 12.27. Kota Tasikmalaya
- 13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat

- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar

- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
 - 15.5. Kabupaten Bondowoso
 - 15.6. Kabupaten Gresik
 - 15.7. Kabupaten Jember
 - 15.8. Kabupaten Jombang
 - 15.9. Kabupaten Kediri
 - 15.10. Kabupaten Lamongan
 - 15.11. Kabupaten Lumajang
 - 15.12. Kabupaten Madiun
 - 15.13. Kabupaten Magetan
 - 15.14. Kabupaten Malang
 - 15.15. Kabupaten Mojokerto
 - 15.16. Kabupaten Nganjuk
 - 15.17. Kabupaten Ngawi
 - 15.18. Kabupaten Pacitan
 - 15.19. Kabupaten Pamekasan
 - 15.20. Kabupaten Pasuruan
 - 15.21. Kabupaten Ponorogo
 - 15.22. Kabupaten Probolinggo
 - 15.23. Kabupaten Sampang
 - 15.24. Kabupaten Sidoarjo
 - 15.25. Kabupaten Situbondo
 - 15.26. Kabupaten Sumenep
 - 15.27. Kabupaten Trenggalek
 - 15.28. Kabupaten Tuban
 - 15.29. Kabupaten Tulungagung
 - 15.30. Kota Batu
 - 15.31. Kota Blitar
 - 15.32. Kota Kediri
 - 15.33. Kota Madiun
 - 15.34. Kota Malang
 - 15.35. Kota Mojokerto
 - 15.36. Kota Pasuruan
 - 15.37. Kota Probolinggo
 - 15.38. Kota Surabaya
16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 16.1. Kabupaten Bantul
 - 16.2. Kabupaten Gunungkidul
 - 16.3. Kabupaten Kulon Progo
 - 16.4. Kabupaten Sleman
 - 16.5. Kota Yogyakarta
17. Provinsi Bali
- 17.1. Kabupaten Badung
 - 17.2. Kabupaten Bangli

- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Mempawah
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangkaraya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng

- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Bau Bau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Tolitoli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Mamasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Buru
- 31.2. Kabupaten Buru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Halmahera Selatan
- 32.6. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.7. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.8. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.9. Kota Ternate
- 32.10. Kota Tidore Kepulauan



33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Numfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Tolikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yalimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrauw
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong



UNIVERSITAS

Wakil Rektor

1. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Universitas Sumatera Utara
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Riau
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya
6. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Andalas
7. Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Universitas Indonesia
8. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor
9. Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Universitas Padjadjaran
10. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung
11. Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro
12. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis dan Informasi Universitas Sebelas Maret
13. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada
14. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Brawijaya
15. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Airlangga
16. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Trunojoyo Madura
17. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin
18. Wakil Rektor Bidang Pengembanfan dan Kerja Sama Universitas Tadulako
19. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi
20. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman
21. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Universitas Lambung Mangkurat
22. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram
23. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama & Informasi Universitas Udayana
24. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Nusa Cendana
25. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Pattimura
26. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Papua
27. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Cenderawasih

Pimpinan Prodi Pelaksana Program Pendidikan

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
2. Ketua Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Andalas;
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
4. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
5. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;
6. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
7. Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
8. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
9. Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
10. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
11. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
12. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;



13. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;
14. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada;
15. Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;
16. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
17. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
18. Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin;
19. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
20. Ketua Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada;
21. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada;
22. Ketua Program Studi Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
23. Ketua Program Studi Magister Pengelolaan dan Sumber Daya Lingkungan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
24. Ketua Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;
25. Ketua Program Studi Magister Studi Kebijakan dan Ilmu Kepemimpinan, Universitas Gadjah Mada;
26. Ketua Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada;
27. Ketua Program Studi Magister Pariwisata, Universitas Udayana
28. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung;
29. Ketua Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga;
30. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Brawijaya;
31. Ketua Program Studi Magister Teknik Perairan, Universitas Brawijaya

Pimpinan Mitra Pelaksana Program Pelatihan Teknis Perencanaan Dan Spesifik Perencanaan

1. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya
2. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
3. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Papua
4. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
5. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura
6. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
8. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia
9. Kepala Lembaga Teknologi Fakultas Teknik (LEMTEK), Universitas Indonesia
10. Kepala Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Padjajaran
11. Kepala *Research Centre for Conflict and Policy* (RCCP), Universitas Brawijaya
12. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP), Universitas Hasanuddin
13. Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah (PSKMPD), Universitas Cendrawasih
14. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjajaran
15. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjajaran
16. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
17. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
18. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
19. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
20. Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
21. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada



22. Ketua Program Studi Magsiter Ilmu Lingkungan dengan peminatan Geo-Informasi, Universitas Gadjah Mada
23. Kepala Pusat dan Pengelola Administrasi Pusat Penelitian Mitigasi Bencana/Research Centre for Disaster Mitigation, Universitas Tadulako
24. Kepala Pusat dan Pengelola Administrasi Pusat Kajian Pengelolaan Risiko Bencana/*Study Center for Disaster Risk Management*, Universitas Mataram

Formulir Kesiediaan/Minat
Menjadi Mitra Instansi Program Pendidikan *Cost Sharing*
Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

(Pengisian Formulir dapat dilakukan melalui online: <https://bit.ly/Formulir-Cost-Sharing>)

Bersama ini, Saya:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Menyatakan: **bersedia / tertarik / tidak tertarik** (lingkari salah satu) untuk menjadi Mitra Instansi Program Pendidikan *Cost Sharing* Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. Apabila Bapak/Ibu memilih **bersedia** atau **tertarik**, silakan isi formulir di bawah ini.

Apabila saya bersedia, dengan ini saya juga menyetujui untuk memberikan informasi di bawah ini yang akan digunakan bahan informasi kepada calon peserta dan calon instansi peserta serta masyarakat umum khusus untuk kepentingan program ini.

...(tempat)...., (tanggal), (bulan), (tahun)

Hormat kami

(ttt)

(Nama)
(jabatan)

Catatan:

Formulir yang sudah diisi dapat disampaikan/dikirim kepada Sdri. Nova Nurlathifa di nomor ponsel/whatsapp 0821-1011-3448 atau Sdri. Diana Ayu Ahira di nomor ponsel/whatsapp 0823-2956-9988 atau melalui pos elektronik/e-mail pusbindiklatren@bappenas.go.id

* Untuk jawaban berbentuk pilihan, berikan tanda centang atau berikan blok warna merah pada pilihan Anda.

Jenis Instansi/Lembaga	<input type="checkbox"/> Kementerian <input type="checkbox"/> Lembaga <input type="checkbox"/> Pemerintah Provinsi <input type="checkbox"/> Pemerintah Kabupaten <input type="checkbox"/> Pemerintah Kota <input type="checkbox"/> Lainnya:	
Alamat: <i>(alamat lengkap institusi)</i>		
Nama Pimpinan: <i>(nama dan jabatan yang memberikan keputusan terkait program OJT)</i>		
Nama dan Narahubung: <i>(isi nama dan no. HP yang dapat dikontak sebagai penghubung)</i>	Nama	
	No. Telp./Ponsel	
	Email	
Tahun Pelaksanaan Program Pendidikan	<input type="checkbox"/> 2022 <input type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2024 <input type="checkbox"/> Belum tahu	
Jenis Program Pendidikan: <i>(Pilih yang cocok, boleh lebih dari satu pilihan)</i>	<input type="checkbox"/> S-2 Dalam Negeri <input type="checkbox"/> S-2 Dalam Negeri Afirmasi <input type="checkbox"/> S-2 Linkage Jepang <input type="checkbox"/> S-2 Linkage Eropa <input type="checkbox"/> S-2 Linkage Australia <input type="checkbox"/> S-3 Dalam Negeri <input type="checkbox"/> S-3 Linkage	
Bidang Studi <i>(Pilih yang cocok, dan disesuaikan dengan bidang yang dibutuhkan)</i>	<input type="checkbox"/> Ekonomi/Studi Pembangunan <input type="checkbox"/> Ekonomi <input type="checkbox"/> Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah <input type="checkbox"/> Administrasi/Kebijakan Publik <input type="checkbox"/> Perencanaan dan Pengembangan Wilayah <input type="checkbox"/> Kesehatan Publik <input type="checkbox"/> Infrastruktur <input type="checkbox"/> Manajemen Transportasi <input type="checkbox"/> Manajemen Sumber Daya Alam <input type="checkbox"/> Manajemen Sumber Daya Air <input type="checkbox"/> Studi Lingkungan/Perubahan Iklim/Kebencanaan <input type="checkbox"/> <i>International Trade/Finance</i> <input type="checkbox"/> <i>International Development/Studies</i> <input type="checkbox"/> Pengembangan Periwisata <input type="checkbox"/> <i>Big Data</i> Perencanaan Pembangunan <input type="checkbox"/> <i>Public Private Partnership</i> <input type="checkbox"/> lainnya, sebutkan:	

Rencana Prodi/Universitas yang akan dituju <i>(Boleh isi lebih dari 1, contoh: MAP UGM, MIE UI)</i>	
Rencana Komponen Biaya yang akan Kami Tanggung: <i>(Informasi ini hanya indikasi jenis pembiayaan yang akan dibiayai. Detilnya akan dituangkan dalam MoU atau Perjanjian tersendiri)</i>	<input type="checkbox"/> Tuition Fee <input type="checkbox"/> Living Allowance <input type="checkbox"/> Biaya tiket <input type="checkbox"/> Biaya buku <input type="checkbox"/> Biaya asuransi <input type="checkbox"/> Biaya penerbitan <input type="checkbox"/> Biaya pelatihan Bahasa Inggris <input type="checkbox"/> Biaya penelitian <input type="checkbox"/> Lainnya sebutkan:
Rencana Jumlah Peserta per Tahun <i>(Jumlah peserta rata-rata per tahun)</i>	orang
Catatan Lain-lain <i>(Bila ada)</i>	

Catatan: Sebagian informasi di atas akan kami umumkan dalam penawaran kepada calon peserta dan instansi peserta baik di media informasi Pusbindiklatren (website, media sosial, surat dan leaflet) atau juga surat-menyurat resmi.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Program Pendidikan Perencanaan Pembangunan
Cost Sharing (Pembiayaan Bersama)

**Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren)**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)**

2022

A. Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan sebagian peran Kementerian PPN/Bappenas menyusun perencanaan pembangunan, Pusbindiklatren bertugas dan berfungsi meningkatkan kapasitas institusi perencanaan dan kualitas SDM perencana di seluruh Indonesia (Permen PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020, 2020). Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusbindiklatren melaksanakan pengembangan program SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik di dalam dan luar negeri. Program pendidikan terdiri dari S-2 dan S-3 baik didalam dan luar negeri. S-2 terdiri dari S-2 dalam Negeri, S-2 Luar Negeri, S-2 Linkage, S-2 Afirmasi Dalam Negeri, dan S-2 Tematik. Sedangkan pelatihan terdiri dari pelatihan fungsional penjenjangan perencana (JFP), pelatihan teknis perencanaan dan pelatihan spesifik serta pelatihan pendukung lainnya. Sampai dengan tahun 2021, jumlah alumni Pusbindiklatren untuk program pendidikan adalah 9.928 orang dan pelatihan 21.013 orang (Pusbindiklatren-Bappenas, 2021).

Meskipun jumlah alumni Pusbindiklatren sudah cukup banyak, berdasarkan identifikasi Pusbindiklatren jumlah kebutuhan Diklat masih tinggi. Misalnya untuk program pendidikan, jumlah perencana memerlukan pendidikan adalah 84.280 orang dengan rincian pendidikan S-2 sebanyak 83.034 orang dan S-3 sebanyak 1.246 orang. Jumlah ini merupakan asumsi ASN yang masih S-1 dan perlu ditingkatkan ke S-2 (75 persen) dan jumlah ASN S-2 yang perlu ditingkatkan ke S-3 (5 persen) (Pusbindiklatren-Bappenas, 2020).

Program pendidikan baik S-2 dan S-3 masih diperlukan karena program ini selain untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi perencana pembangunan. Program pendidikan adalah program investasi jangka menengah dan jangka panjang dalam sistem manajemen pembangunan. Program pendidikan diarahkan menghasilkan SDM untuk menguasai substansi perencanaan pembangunan, kemampuan analisis dan teknik serta metode pemecahan masalah yang komprehensif yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan.

Namun demikian seiring dengan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri, pembiayaan pinjaman untuk program Diklat mulai dikurangi dan bahkan untuk program pendidikan tidak diizinkan menggunakan pinjaman luar negeri oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan kebutuhan dana Pusbindiklatren untuk melanjutkan program pengembangan SDM Perencana Pembangunan, maka perlu dilakukan penjajakan kerja sama pembiayaan untuk program Pendidikan Perencanaan Pembangunan antara Pusbindiklatren dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan lembaga lainnya sesuai dengan tujuan dan ketentuan program pendidikan.

B. Tujuan

Program kerja sama ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi lembaga dan sumber-sumber pembiayaan yang berpotensi untuk kerja sama program Pendidikan Perencanaan Pembangunan di Pusbindiklatren Bappenas;
2. Menyusun rencana kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam bidang Pendidikan Perencanaan Pembangunan di Pusbindiklatren Bappenas;
3. Memberikan pedoman untuk rencana dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam bidang Pendidikan Perencanaan Pembangunan di Pusbindiklatren Bappenas.

C. Program Pendidikan Perencanaan Pembangunan *Cost Sharing*

1. Pengertian

Program pendidikan baik S-2 (master/magister) dan S-3 (doktor) adalah jenjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan melakukan analisis serta pemecahan masalah-masalah strategis isu-isu perencanaan pembangunan.

2. Tujuan dan Program Pendidikan

Tujuan program Pendidikan perencanaan pembangunan ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ASN Perencana terkait regulasi, kebijakan, konsep dan isu-isu umum serta spesifik di bidang perencanaan pembangunan melalui program pendidikan S-2 dan S-3;
- b. Mengubah cara pandang dan pola berpikir serta sikap para ASN perencana di pusat dan daerah dalam menyusun dan menangani isu-isu di bidang perencanaan pembangunan melalui program pendidikan.
- c. Meningkatkan kemampuan analisa dan penerapan metode serta teknik para ASN perencana di pusat dan daerah dalam menyusun dan menangani isu-isu di bidang perencanaan pembangunan melalui program pendidikan.

3. Topik atau tema

Tabel 1. Topik Program Pendidikan

Topik
<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Infrastruktur• Pengembangan Wilayah• Kesehatan masyarakat• Penanggulangan kemiskinan• Pengembangan energi baru

Topik
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Wisata • Perencanaan Penanggulangan Bencana • SDGs • Lingkungan Hidup • Pengembangan Ekonomi Lokal • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha • Pembangunan Satu Data Pembangunan • Pembangunan dan Pengembangan Kota

4. Jenis Program Pendidikan

Program Pendidikan Perencana Pembangunan ini terdiri dari dua, yaitu (1) Pendidikan strata 2 atau Master/Magister, dan (2) Pendidikan Strata 3 atau Doktor.

Tabel 2. Jenis Program Pendidikan

Program	Lokasi	Jenis Program	Durasi Perkuliahan
S-2	Dalam Negeri	Reguler 18 bulan	18 Bulan
		Afirmasi	24 bulan
		Spesifik	18 Bulan
	Dalam dan Luar Negeri	24 bulan	
S-3	Dalam Negeri	Reguler 36 bulan	36 Bulan
	Dalam dan Luar Negeri	<i>Linkage</i>	48 Bulan

5. Perguruan Tinggi

Program Pendidikan perencana pembangunan ini akan dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi yang telah memiliki kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Usulan perguruan tinggi selain kerja sama dapat dilakukan namun harus memenuhi ketentuan Pusbindiklatren Bappenas.

6. Mekanisme Kerja Sama

(1) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, Pusbindiklatren menetapkan program, menentukan perguruan tinggi, melakukan perjanjian kerja sama dan persiapan ketentuan teknis lainnya.

(2) Identifikasi Target institusi

Pada tahap selanjutnya, Pusbindiklatren melakukan identifikasi insititusi baik K/L/D dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama baik pengiriman peserta maupun pembiayaan. Pada tahap ini dilakukan diskusi penjajakan kerja sama dan apabila disetujui akan dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pusbindiklatren dan K/L/D.

(3) Penawaran Peserta

Setelah melakukan kerja sama dengan mitra institusi, selanjutnya Pusbindikaltren menawarkan program Pendidikan kepada calon peserta di pusat dan daerah. Pusbindiklatren menawarkan program dan apabila peserta mendaftar maka diminta untuk formulir tentang nama program, jenis program, tata cara dan batas pendaftaran, persyaratan peserta, perguruan tinggi pilihan, waktu dan durasi, hak dan kewajiban serta informasi lainnya.

(4) Seleksi

Setelah tahap penawaran dan pendaftaran, maka dilakukan seleksi terhadap calon peserta sesuai dengan kriteria dan persyaratan peserta. Pusbindiklatren melakukan seleksi awal untuk persyaratan administrasi dan selanjutnya seleksi TPA dan TOEFL serta wawancara tertulis. Untuk progam S-3 wawancara dapat dilakukan secara langsung oleh Pusbindiklatren dan atau institusi mitra kerja sama.

(5) Pelaksanaan

Setelah calon peserta terseleksi ditetapkan, maka Pusbindiklatren mengirim peserta kepada perguruan tinggi sesuai dengan pilihan peserta atau ketersediaan bangku di perguruan tinggi. Apabila pilihan 1 peserta tidak diterima, maka peserta akan diarahkan kepada pilihan 2 dan begitu seterusnya sampai dengan pilihan

(6) Pasca Program

Setelah selesai pelaksanaan program, peserta wajib melaporkan dan menyerahkan dokumen kepada Pusbindiklatren. Selanjutnya Pusbindiklatren akan membuat laporan penyelesaian studi. Alumni juga berkewajiban untuk mengisi kuesioner evaluasi setelah lulus dalam rangka mengetahui dampak program dan penelusuran alumni (*alumni survey*) secara berkala.

(7) Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan program ini Pusbindiklatren akan menyusun desain dan melaksanakan pemantauan terhadap peserta dan perguruan tinggi. Sedangkan terhadap substansi kegiatan ini Pusbindiklatren akan melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan program, substansi program, kerja sama dengan target institusi dan kinerja peserta. Evaluasi peserta difokuskan pada kemajuan studi, permasalahan dan isu-isu lainnya.

D. Tugas dan Peran

Untuk memperlancar pelaksanaan program Pendidikan, maka perlu disusun pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak antara Pusbindiklatren, peserta dan target institusi. Tabel 3 di bawah ini adalah ringkasan hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban yang akan mengikat kedua belah pihak akan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak.

Tabel 3. Tugas dan Peran Para Pihak

Hak & Kewajiban	Hak	Kewajiban
Pusbindiklatren	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan kebijakan strategis program pendidikan2. Melakukan kerja sama dengan prodi di perguruan tinggi3. Menentukan kriteria seleksi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan, regulasi dan pedoman program2. Menyediakan anggaran sesuai dengan ketentuan3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program4. Melakukan seleksi dan penempatan5. Melakukan pemantauan dan evaluasi
Institusi Mitra Pusbindiklatren	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima informasi tentang program dengan baik2. Mengirimkan calon peserta bagi K/L/Pemda3. Memberikan saran dan masukan terkait kebijakan program4. Mendapatkan hasil evaluasi terhadap progress studi karyasiswa yang dibiayai	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan ruang lingkup program2. Menyediakan anggaran sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan

E. Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*)

Pembiayaan program dalam negeri pada dasarnya dibagi sebagai berikut:

Tabel 4. Skema Pembiayaan Bersama Program Pendidikan

Jenis Pembiayaan	Pusbindiklatren	Institusi Peserta
Living allowance	-	V
Tuition/Program Fee	V	-
Tiket	-	V
Transport Lokal	-	V
Bantuan Penelitian	V	-
Bantuan Penerbitan Paper	V	-

Pembiayaan program *linkage* pada dasarnya dibagi sebagai berikut:

Tabel 5. Skema Pembiayaan Program Pendidikan *Linkage*

Jenis Pembiayaan	Pusbindiklatren	Institusi Peserta
1 Tahun di Indonesia*		
Seleksi	V	-
Living allowance	V	-
Tuition/Program Fee	V	-
Tiket lokasi-perguruan tinggi	-	V
Transport Lokal	-	V
Bantuan Penerbitan	V	-
1 Tahun di LN*		
Living allowance	-	V
Tuition/Program Fee	-	V
Tiket	-	V
Transport Lokal	-	V
Bantuan Penelitian	V	-
Asuransi	-	V
Bantuan Penerbitan	V	-
Paspor/Visa	-	V

F. Penutup

Pusbindiklatren bertugas dan berfungsi meningkatkan kualitas SDM Perencana di Pusat dan Daerah melalui program beasiswa Diklat di dalam dan luar negeri. Namun demikian dengan adanya kebijakan pengurangan pinjaman terutama luar negeri, yang selama ini menjadi sumber pendanaan utama Pusbindiklatren Bappenas, maka diperlukan upaya pencarian sumber pendanaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Mengingat kebutuhan pendanaan untuk melanjutkan Diklat tersebut cukup besar dan mengingat masih terdapat kebutuhan untuk pengembangan SDM Perencana di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki sumber pendanaan, maka Pusbindiklatren perlu menyusun melakukan kerja sama program pendidikan.

Jakarta, 30 Maret 2022

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana



Guspika

Daftar Referensi

- Permen PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020. (2020). Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. In *Bappenas*. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Pusbindiklatren-Bappenas. (2020). *Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas 2020*.